

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK – 2020



kerjasama



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



IPB University
— Bogor Indonesia —

Departemen Statistika - FMIPA
Institut Pertanian Bogor

Gini Ratio Kota Depok 2020

Gini Ratio Kota Depok 2020

Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: A4 29.7 cm × 21.0 cm
Jumlah halaman / <i>Total size</i>	: 26 halaman / <i>page</i>
Naskah / <i>Manuscript</i>	: Fakultas Matematika dan IPA, IPB University
Gambar kulit dan Seting / <i>Cover design and Setting</i>	: Fakultas Matematika dan IPA, IPB University
Diterbitkan oleh / <i>Published by</i>	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2020 dapat diterbitkan. Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2020 ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk yang terjadi di Kota Depok. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial yang lebar dan tajam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2020 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,

Dr. Ir. Sidik Mulyono, M. Eng
NIP. 19670124 198602 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan baru bisa dikatakan berhasil jika tinggi dampaknya dirasakan secara merata oleh pertumbuhan ekonomi yang seluruh lapisan penduduk. Ketimpangan pendapatan antar penduduk memang sangat sulit dihindari, namun ketimpangan yang terjadi harus bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Buku Gini Ratio Kota Depok 2020 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Depok.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, Desember 2020

**Ketua Departemen Statistika
FMIPA - Institut Pertanian Bogor**

Dr. Anang Kurnia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sumber Data	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi	3
2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok	7
BAB III GINI RATIO KOTA DEPOK	10
3.1. Gambaran Umum Kota Depok.....	10
3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2020	14
3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2020.....	16
3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok tahun 2010-2020.....	17
BAB IV PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan.....	24
4.2. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa).....	11
Tabel 2. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2020	11
Tabel 3. Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran	13
Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 5. Hitung Indeks Gini Tahun 2020 di Kota Depok.....	15
Tabel 6. Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2020	17
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Depok 2010-2020	18
Tabel 8. PDRB Kota Depok 2010-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	20
Tabel 9. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2020	21
Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2018-2020	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorenz.....	8
Gambar 2. Kurva Lorenz Kota Depok 2020	16
Gambar 3. Jumlah Penduduk Kota Depok 2010-2020.....	18
Gambar 4. PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	19
Gambar 5. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2020.....	20
Gambar 6. Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok Tahun 2010-2019.....	22
Gambar 7. Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumberdaya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya penemuan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil.

Meskipun bukan satu-satunya, indikator makro utama yang sering digunakan di berbagai perbincangan mengenai kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya. Pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan keadaan pada waktu atau periode sebelumnya penting untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh suatu pemerintahan telah berjalan dengan efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan melebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat serta kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ini akan menyebabkan kecemburuan sosial dan ekonomi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Depok selama periode 2011-2019 adalah 7.04. Nilai tersebut secara makro dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun dengan adanya pandemik Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020, pemerintah Kota Depok perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat meningkat/menurun, apakah ketimpangan antar golongan masyarakat meningkat/menurun pada tahun 2020 ini. Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan alat untuk mengukur ketimpangan tersebut diantaranya dengan menggunakan gini ratio dan Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia.

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kondisi ketimpangan ekonomi Kota Depok tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio dan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, sehingga akan diperoleh :

- a. Nilai indeks Gini Ratio Kota Depok tahun 2020 beserta kategorinya, dengan disandingkan dengan indeks Gini Ratio Kota Depok tahun-tahun sebelumnya;
- b. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2020 beserta kategorinya, disandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Analisis mengenai hasil yang ada.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan Gini Ratio Kota Depok tahun 2020 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 khususnya data KOR (data dasar), PDRB Kota Depok 2019, dan Data Jumlah Penduduk Kota Depok 2020. Sumber data tersebut berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok dan BPS Pusat.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Topik ini adalah masalah di hampir semua negara di dunia dan seringkali orang yang berada dalam kemiskinan memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Meskipun tentu saja orang yang terlahir dalam kemiskinan tidak otomatis berarti akan tetap miskin. Pendidikan, di semua tingkatan, peningkatan keterampilan, dan kebijakan pelatihan dapat digunakan bersamaan dengan program bantuan sosial untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Terdapat beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang bisa disebutkan yaitu antara lain:

1. **Ketimpangan Pendapatan**

Ketidaksetaraan pendapatan adalah sejauh mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata dalam sekelompok orang. Pendapatan bukan hanya uang yang diterima melalui pembayaran, tetapi semua uang yang diterima dari pekerjaan (upah, gaji, bonus, dll.), investasi, seperti bunga pada rekening tabungan dan dividen dari saham, tabungan, tunjangan negara, pensiun (negara), pribadi, perusahaan) dan sewa. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara individu atau rumah tangga - pendapatan semua orang yang berbagi rumah tangga tertentu. Pendapatan rumah tangga sebelum pajak yang mencakup uang yang diterima dari sistem jaminan sosial dikenal sebagai pendapatan kotor. Pendapatan rumah tangga termasuk semua pajak dan tunjangan dikenal sebagai pendapatan bersih.

2. **Ketimpangan Bayaran/Upah**

Bayaran/upah seseorang berbeda dengan penghasilan mereka. Bayaran mengacu pada pembayaran dari pekerjaan saja. Ini dapat dilakukan setiap jam, bulanan atau tahunan, biasanya dibayar mingguan atau bulanan

dan mungkin juga termasuk bonus. Oleh karena itu, ketimpangan pembayaran menjelaskan perbedaan antara upah orang dan ini mungkin berada dalam satu perusahaan.

3. Ketimpangan Kekayaan

Kekayaan mengacu pada jumlah total aset individu atau rumah tangga. Ini mungkin termasuk aset keuangan, seperti obligasi dan saham, properti dan hak pensiun swasta. Karena itu, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata dalam sekelompok orang.

Kajian-kajian terdahulu tentang ketimpangan pendapatan telah menemukan beberapa faktor yang berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagian besar studi menemukan pendidikan menjadi faktor penting yang menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih luas antara si miskin dan si kaya (Chongvilaivan dan Kim 2015; De Silva dan Sumarto 2013). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa akses ke masalah keuangan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan (Wan dan Zhou 2004; Bae, Han, dan Son 2012). Menurut penelitian oleh World Bank (2016), ada beberapa penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia: (i) kesempatan tidak merata, (ii) pekerjaan yang tidak setara, (iii) konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan (iv) resiliensi rendah.

Akses yang tidak merata ke pendidikan dapat menimbulkan ketidaksetaraan di masa depan karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung melakukan pekerjaan bergaji rendah, yang biasanya di sektor sektor informal. Perbedaan dalam akumulasi kekayaan juga penting dalam menentukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi penghasilan anggota rumah tangga di masa depan.

Studi oleh Wicaksono, Amir dan Nugroho (2017) menunjukkan bahwa pendidikan, kekayaan, serta sektor pekerjaan merupakan kontributor signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang bertujuan mengurangi akses yang tidak merata ke pendidikan dan keuangan penting untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan di masa depan.

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan

ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda (The Equality Trust, 2011).

Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan:

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini mengukur ketimpangan di seluruh masyarakat daripada hanya membandingkan berbagai kelompok pendapatan. Jika semua pendapatan pergi ke satu orang (ketimpangan maksimum) dan semua orang tidak mendapat apa-apa, koefisien Gini akan sama dengan 1. Jika pendapatan dibagi sama rata, dan semua orang mendapatkan sama persis, Gini akan sama dengan 0. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin setara masyarakat.

Koefisien Gini dapat mengukur ketimpangan sebelum atau sesudah pajak dan sebelum atau setelah biaya perumahan. Gini akan berubah tergantung pada apa yang diukur. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang
- $G > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

2. Ukuran Rasio

Ukuran rasio membandingkan berapa banyak orang di satu tingkat distribusi pendapatan dibandingkan dengan orang di tingkat lain. Misalnya, rasio 20:20 membandingkan seberapa kaya 20% orang teratas, dibandingkan dengan 20% terbawah.

Rasio yang umum digunakan antara lain:

- Rasio 50/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian tengah dan bagian bawah dari distribusi pendapatan
- 90/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian bawah
- 90/50 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan tengah
- 99/90 - menjelaskan ketimpangan antara bagian paling atas dan atas

3. Palma Ratio

Palma Ratio adalah rasio bagi hasil dari 10% teratas dengan 40% terbawah. Dalam masyarakat yang lebih setara, rasio ini akan menjadi satu atau lebih rendah, yang berarti bahwa 10% teratas tidak menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional dari 40% terbawah. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, rasionya mungkin sebesar 7.

4. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan dengan dasar pengelompokkan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok

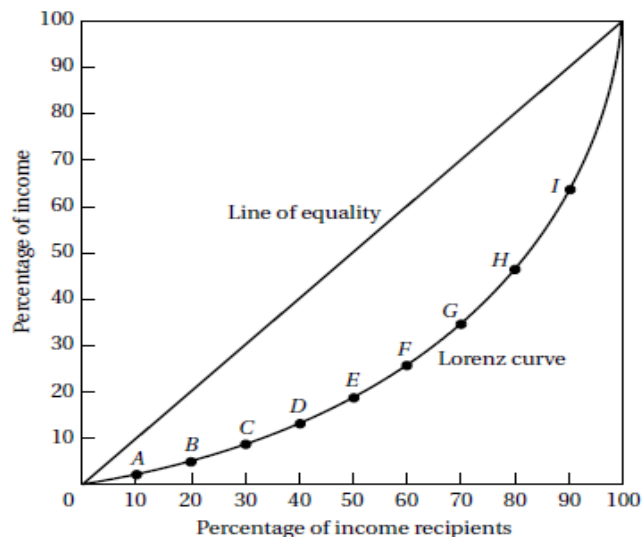
Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan, namun karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi data pendapatan.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan suatu ketimpangan sempurna, yang berarti satu orang dalam suatu populasi menguasai semua pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ide dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Untuk menghitung Indeks Gini dibutuhkan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk Indeks Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya)

digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (Gambar 1 – Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.



Gambar 1. Kurva Lorenz

Adapun rumus umum Indeks Gini adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

dimana

- fp_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- Fc_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- Fc_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

dimana

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i - 1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i : Persentase pendapatan ke i

BAB III

GINI RATIO KOTA DEPOK

3.1. Gambaran Umum Kota Depok

Kota Depok yang merupakan salah satu wilayah termuda di Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 200,30 km². Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terhubung secara regional dengan kota-kota lainnya. Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif apabila dilihat dari letaknya yang sangat strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan yaitu Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayang, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo dan Cinere. Populasi penduduk Kota Depok tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang dipublikasikan pada <https://depokkota.bps.go.id> sebanyak 2.484.186 jiwa yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.249.118 jiwa dan perempuan sebanyak 1.235.068 jiwa (Tabel 1). Jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 sebesar 1.01.

Tabel 2 memberikan gambaran mengenai proyeksi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Depok untuk tahun 2020. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10 persen terbawah adalah sejumlah 660.299 rupiah per kapita per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar 401.089 rupiah per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar 802.298 rupiah per orang setiap bulannya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
0 - 4	113 507	107 144	220 651
5 - 9	105 500	101 885	207 385
10 -14	92 691	88 250	180 941
15 - 19	95 481	99 384	194 865
20 - 24	109 340	110 287	219 627
25 - 29	109 699	113 702	223 401
30 - 34	114 708	112 959	227 667
35 - 39	108 353	107 716	216 069
40 - 44	103 382	99 970	203 352
45 - 49	86 874	85 003	171 877
50 - 54	70 482	69 263	139 745
55 - 59	54 152	53 806	107 958
60 - 64	36 684	35 971	72 655
65 - 69	25 291	22 454	47 745
70 - 74	13 093	12 866	25 959
75+	9 881	14 408	24 289
Jumlah	1 249 118	1 235 068	2 484 186

Tabel 2. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2020

No	Kelompok Pengeluaran (Rp)	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
		Rata-rata (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<=802,298	660,299	401,089	802,298	88,672
2	802,299 - 1,054,811	926,694	804,285	1,054,811	82,634
3	1,054,812 - 1,288,985	1,169,301	1,056,046	1,288,985	65,970
4	1,288,986 - 1,526,867	1,410,412	1,291,638	1,526,867	67,253
5	1,526,868 - 1,813,601	1,655,559	1,527,988	1,813,601	80,127
6	1,813,602 - 2,109,967	1,938,125	1,814,716	2,109,967	87,420
7	2,109,968 - 2,495,394	2,295,797	2,118,366	2,495,394	111,593
8	2,495,395 - 3,123,943	2,754,600	2,499,842	3,123,943	173,299
9	3,123,944 - 3,987,385	3,478,454	3,125,929	3,987,385	249,255
10	>= 3,987,386	5,937,166	4,007,028	23,998,148	2,954,486

Besaran pengeluaran meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10 persen teratas adalah sebesar 5.937.166 rupiah per kapita per bulan, melonjak hampir 1.7 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran di bawahnya yang sebesar 3.478.454 rupiah per orang per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar 4.007.028 rupiah per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar 23.998.148 rupiah per orang setiap bulannya.

Salah satu indikator perekonomian dalam suatu wilayah adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan komposisi PDRB menurut sektoral dapat diketahui struktur perekonomian suatu wilayah. Sedangkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu menunjukkan besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku tahun 2019 ialah 71,041.99 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar dihasilkan oleh kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta kategori konstruksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Bagi setiap daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (BPS, 2001). Perekonomian Kota Depok tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2019 mencapai 6.74 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 6.97 persen (Kota Depok Dalam Angka 2020). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori real estat sebesar 10.84 persen. Sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia pada awal Maret 2020, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan tidak terkecuali perekonomian di Kota Depok. Secara umum, pandemi COVID-19 terbukti telah menahan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Indonesia pada triwulan I 2020. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada kisaran -2,0 s.d. -1,6 persen (year on year) yang merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir. Namun demikian, rentang ini masih dalam perkiraan pemerintah yaitu antara -1,7% dan -

0,6%. (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Sehingga laju pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2020 diprediksi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Tabel 3. Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran

t	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pertanian	14.46	13.88	17.41	14.70	17.10	18.03	14.52	22.96	23.10	21.39
Pertambangan dan penggalian	0.00	0.00	0.00	1.71	1.86	1.95	0.00	0.00	3.80	0.00
Industri Pengolahan	9.36	7.63	12.30	10.95	11.71	7.43	4.47	8.11	2.82	6.90
Listrik dan Gas	3.13	1.17	1.68	0.85	2.28	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Konstruksi/bangunan	8.70	14.29	11.83	6.79	8.03	7.72	2.58	2.58	4.14	5.27
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	24.50	27.14	14.28	28.90	26.33	20.10	35.69	13.03	24.08	17.42
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	7.48	1.64	14.98	6.43	12.31	12.80	18.38	9.86	9.57	6.80
Kuangan dan asuransi	0.00	2.54	2.67	4.80	2.77	2.53	4.55	9.03	5.14	11.07
Jasa dan lainnya	32.37	31.70	24.85	24.87	17.60	27.38	19.82	34.44	27.34	31.15
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran. Sebagian besar penduduk pada kelompok 10 persen pengeluaran terbawah dan kelompok 10 persen pengeluaran teratas menjadikan sektor jasa dan lainnya sebagai lapangan usahanya. Sektor Perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan lapangan usaha tertinggi kedua dari kedua kelompok pengeluaran dengan masing-masing persentasenya adalah 24.50% untuk kelompok 10 persen pengeluaran terendah dan 17.42 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran teratas. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan penggalian menjadi lapangan usahan paling rendah di antara semua sector lapangan usaha yang ada.

Pendidikan merupakan salah satu peubah yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah kesenjangan. Hal tersebut karena investasi pada sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan. Tabel 4

menyajikan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran dan tingkat Pendidikan. Untuk kelompok pengeluaran 10 persen terendah terlihat bahwa kelompok ini mayoritas adalah penduduk dengan tingkat Pendidikan tertinggi adalah SLTA/ sederajat. Hanya sekitar 0.61 persen penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas.

Sebaliknya pada kelompok pengeluaran 10 persen teratas, Sebagian besar penduduk merupakan tamatan SLTA/ sederajat dan Universitas. Pada kelompok ini, 28.81 persen merupakan tamatan SLTA/ sederajat dan 62.01 persen merupakan tamatan universitas. Namun ada sekitar 6.34 persen tingkat pendidikan kurang dari SD pada kelompok pengeluaran ini, sementara 1.08 persen dan 1.75 persen untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat dan SLTA/ sederajat.

Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	<SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SLTA/ sederajat	Universitas	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
<=802,298	19.56	23.61	16.87	39.34	0.61	100
802,299 - 1,054,811	8.72	18.03	28.66	41.16	3.44	100
1,054,812 - 1,288,985	12.15	21.16	22.38	41.24	3.08	100
1,288,986 - 1,526,867	8.60	16.18	16.36	48.63	10.23	100
1,526,868 - 1,813,601	12.37	13.88	15.42	48.50	9.82	100
1,813,602 - 2,109,967	11.82	5.56	14.01	53.76	14.86	100
2,109,968 - 2,495,394	6.06	4.27	13.57	49.42	26.68	100
2,495,395 - 3,123,943	10.72	5.36	7.80	41.39	34.73	100
3,123,944 - 3,987,385	12.11	1.10	1.89	34.52	50.39	100
>= 3,987,386	6.34	1.08	1.75	28.81	62.01	100

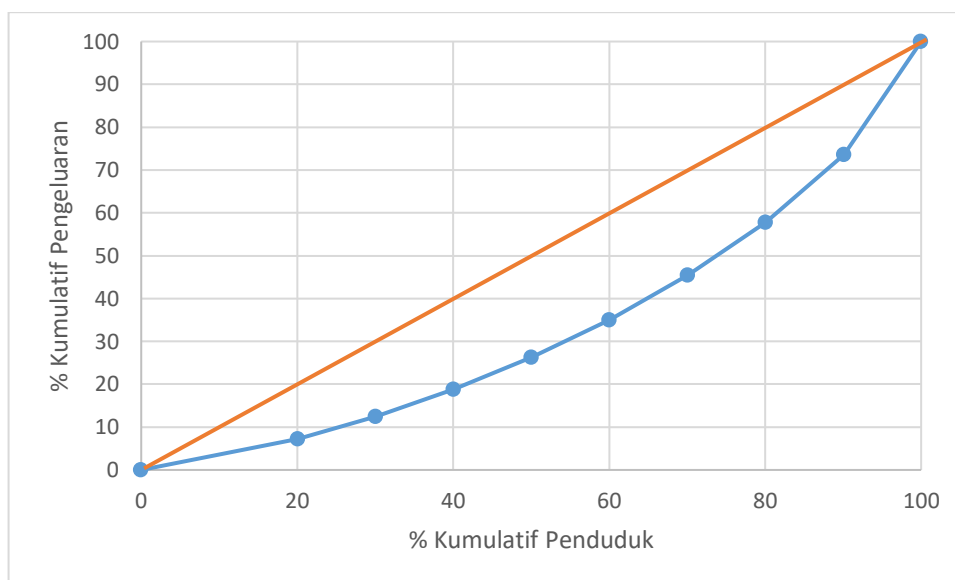
3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2020

Jumlah penduduk kota Depok pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.484.186 jiwa (<https://depokkota.bps.go.id>). Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang sebesar 2.406.826, laju pertumbuhan penduduk Kota Depok pada periode tersebut adalah sebesar 3,21 persen. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kota Depok tahun 2020, ada sekitar 250.162 jiwa dari jumlah penduduk Kota Depok yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah berada di Rp. 660.299. Sedangkan ada 245.129 jiwa yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi berada di Rp. 5.937.166 (Tabel 5).

Tabel 5. Hitung Indeks Gini Tahun 2020 di Kota Depok

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk [P]	Persentase Jumlah Penduduk [%P]	Pendapatan [C]	%C [Fc]	fp x [Fc +Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=802,298	660,299	250,162	0.1007018	165,181,700,000	0.02998415	
802,299 - 1,054,811	926,694	248,447	0.1000114	230,234,400,000	0.04179266	0.010177259
1,054,812 - 1,288,985	1,169,301	248,298	0.0999515	290,335,200,000	0.05270229	0.019616063
1,288,986 - 1,526,867	1,410,412	247,644	0.0996882	349,280,200,000	0.06340212	0.031138634
1,526,868 - 1,813,601	1,655,559	249,020	0.1002421	412,267,500,000	0.07483571	0.045168901
1,813,602 - 2,109,967	1,938,125	247,706	0.0997132	480,085,300,000	0.08714614	0.061082278
2,109,968 - 2,495,394	2,295,797	250,107	0.1006797	574,195,100,000	0.10422916	0.080941946
2,495,395 - 3,123,943	2,754,600	247,448	0.0996093	681,620,400,000	0.12372924	0.102788189
3,123,944 - 3,987,385	3,478,454	250,225	0.1007272	870,396,200,000	0.15799625	0.132319145
>= 3,987,386	5,937,166	245,129	0.0986758	1,455,372,000,000	0.26418228	0.171283174
Indeks Gini 2020 = 0.342						

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Kota Depok pada tahun 2020 tercatat sebesar 0.342. Dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2019 (0.344), maka Indeks Gini Kota Depok mengalami penurunan sebesar 0.002 poin. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik, Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,381 sehingga kondisi ketimpangan di Kota Depok lebih rendah dibandingkan Nasional. Namun Indeks Gini Kota Depok tahun 2020 ini, masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kota Depok untuk tahun 2020 ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 2).



Gambar 2. Kurva Lorenz Kota Depok 2020

3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2020

Salah satu kriteria kesenjangan yang diukur oleh Bank Dunia adalah dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40% kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20% kelompok berpendapatan tinggi.

Jika ketimpangan dilihat berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada Tahun 2020 di Kota Depok kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 18.79% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 994.551 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.1.040.702. Kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 38.99% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 994.281 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.2.160.524. Sementara kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 42.22% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 495.354 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.4.695.163 (Tabel 6). Berdasarkan fakta tersebut,

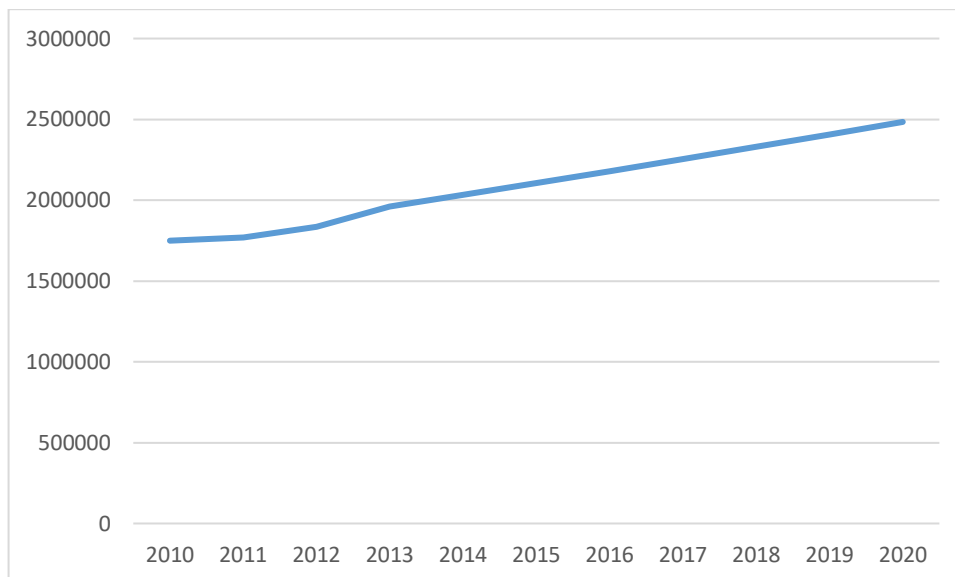
tingkat ketimpangan di Kota Depok berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2020 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 6. Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2020

Kelompok Pengeluaran	Proporsi Jumlah Penduduk (jiwa)	Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40 persen Terendah	994,551	1,040,702	1,035,031,572,840	18.79
40 persen Menengah	994,281	2,160,524	2,148,168,221,757	38.99
20 persen Tertinggi	495,354	4,695,163	2,325,767,861,866	42.22
Total	2,484,186	2,217,614	5,508,967,656,463	100

3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok tahun 2010-2020

Jumlah penduduk Kota Depok pada periode 2010-2020 berkisar antara 1,749,494 jiwa (tahun 2010) sampai dengan 2,484,186 jiwa (tahun 2020) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.58% (Tabel 7) dan menunjukkan pola trend linier (Gambar 3). Sehingga dari tahun ke tahun kepadatan penduduk di Kota Depok terus meningkat. Berdasarkan data yang dipublikasi BPS Kota Depok, tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 12,017 penduduk per km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sukmajaya yaitu sebesar 18,536 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6,532 jiwa/km². Sementara untuk tahun 2020, kepadatan penduduk diperkirakan 12,402 penduduk per km².

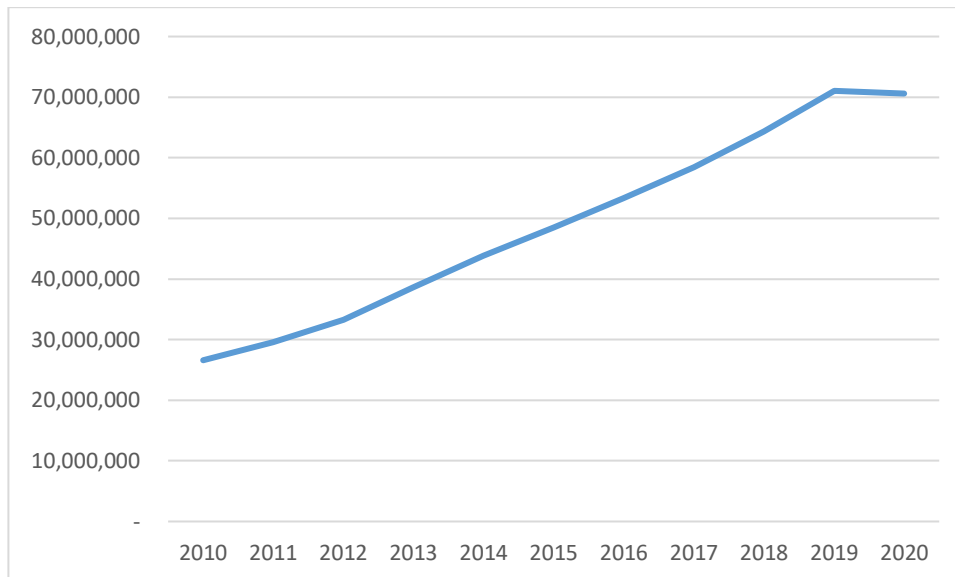


Gambar 3. Jumlah Penduduk Kota Depok 2010-2020

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Depok 2010-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Depok
[1]	[2]
2010	1,749,494
2011	1,769,787
2012	1,835,957
2013	1,962,182
2014	2,033,551
2015	2,106,102
2016	2,179,813
2017	2,254,513
2018	2,330,333
2019	2,406,826
2020	2,484,186

Sumber : BPS



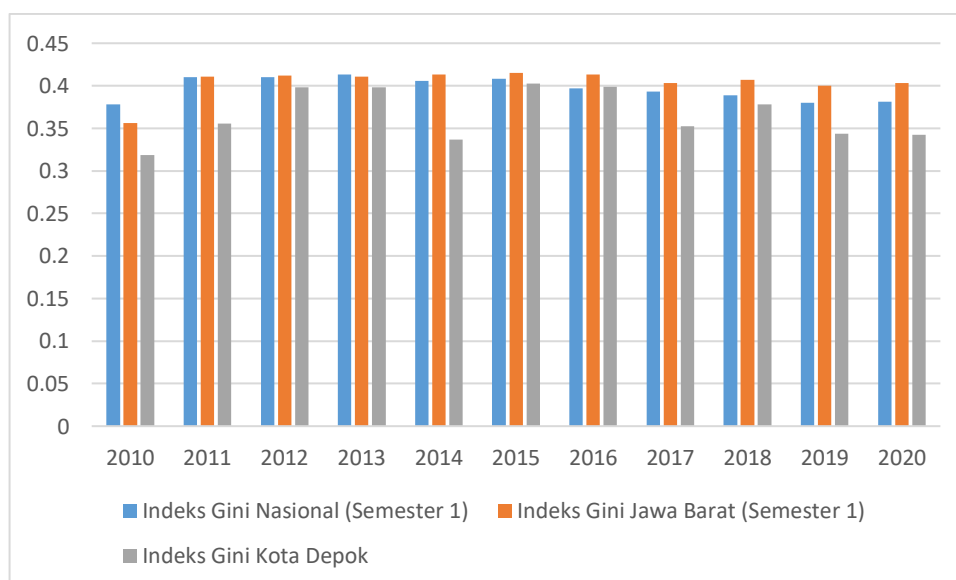
Gambar 4. PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tabel 8 menyajikan PDRB Kota Depok pada periode 2010-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah). Pada periode tersebut, selain pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan nilai minimum sebesar 26,601,854 (Juta Rupiah) pada tahun 2010, dan nilai maksimum sebesar 71,041,986 (Juta Rupiah) pada tahun 2019 (Gambar 4). Peningkatan PDRB pada periode 2010-2019 berfluktuasi pada kisaran 9.52% (tahun 2016-2017) sampai dengan 16.05% (tahun 2012-2013). Meskipun pada tahun 2020 diperkirakan terjadi penurunan PDRB dari tahun 2019 sebesar 0.65%, namun secara umum pada periode 2010-2020, PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 10.33%. Secara rata-rata, PDRB Kota Depok pada periode tersebut adalah sebesar 48,924,657 (Juta Rupiah).

Tabel 8. PDRB Kota Depok 2010-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
[1]	[2]
2010	26,601,854
2011	29,594,665
2012	33,283,562
2013	38,627,196
2014	43,806,035
2015	48,532,645
2016	53,331,051
2017	58,408,777
2018	64,363,244
2019	71,041,986
2020*	70,580,213

Catatan : *hasil proyeksi



Gambar 5. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2020

Tabel 9 menampilkan Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2010-2020. Terlihat bahwa pada periode tersebut, kecuali pada tahun

2016 yang sedikit di atas Nasional, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun propinsi Jawa Barat (Gambar 5). Khusus di Kota Depok, Indeks Gini tersebut berfluktuasi pada kisaran 0.318 (tahun 2010) sampai dengan 0.402 (tahun 2015). Pada periode 2010-2020, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0.366, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0.397) dan Indeks Gini Propinsi Jawa Barat (0.404). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2010-2020 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Khususnya dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan Indeks Gini di Kota Depok, artinya ada perbaikan pemerataan pendapatan di Kota Depok.

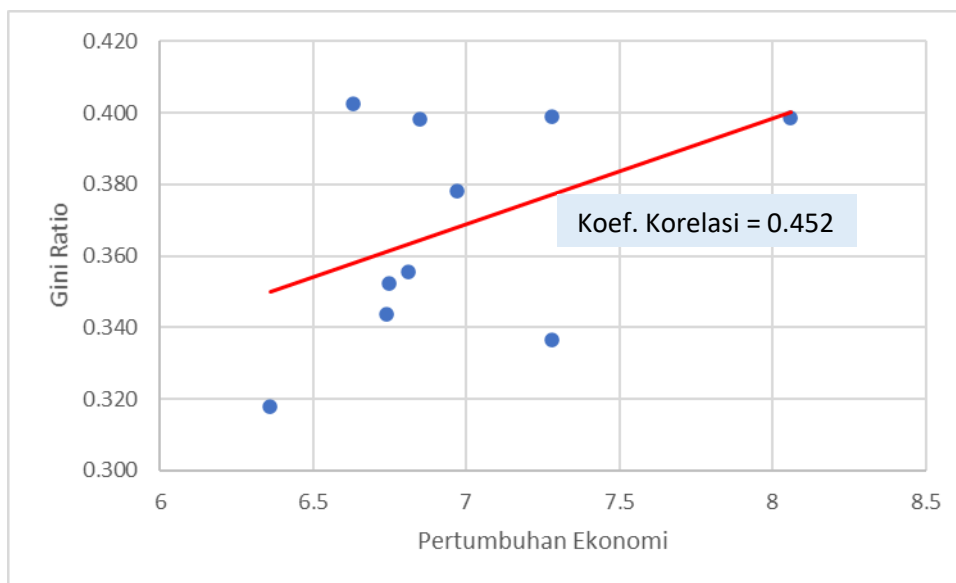
Tabel 9. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2020

Tahun	Indeks Gini Nasional (Semester 1)	Indeks Gini Jawa Barat (Semester 1)	Indeks Gini Kota Depok
[1]	[2]	[3]	[4]
2010	0.378	0.356	0.318
2011	0.410	0.411	0.355
2012	0.410	0.412	0.398
2013	0.413	0.411	0.398
2014	0.406	0.413	0.337
2015	0.408	0.415	0.402
2016	0.397	0.413	0.399
2017	0.393	0.403	0.352
2018	0.389	0.407	0.378
2019	0.380	0.400	0.344
2020	0.381	0.403	0.342

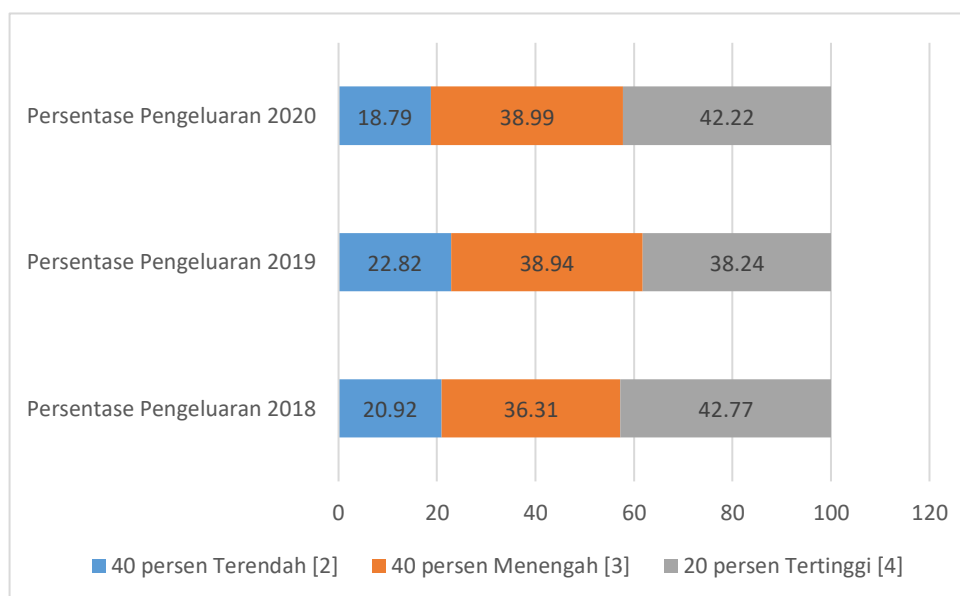
Sumber : BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan dua hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian baik peneliti sosial maupun ekonomi, hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama tahun 2010-2020 cukup tinggi, yang selalu di atas 6 persen dan angka

pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut masih disertai dengan adanya ketimpangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas atau belum inclusive. Hal itu terlihat dari koefisien korelasi antara Indeks Gini dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Gambar 6. Koefisien korelasi berada pada nilai positif dan masuk pada kategori sedang ($r=0.452$).



Gambar 6. Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok Tahun 2010-2019



Gambar 7. Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia

Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2018-2020

Kelompok Pengeluaran	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata pengeluaran 2018	935,058	1,974,059	4,781,814
Rata-rata pengeluaran 2019	1,034,562	2,159,448	4,607,661
Rata-rata pengeluaran 2020	1,040,702	2,160,524	4,695,163

Gambar 7 menyajikan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok untuk tiga tahun terakhir (2018 – 2020). Kelompok pengeluaran 40% terendah pada tahun 2020, persentase pengeluarannya terkecil dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran ini berturut-turut dari tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah Rp. 935,058, Rp. 1,034,562 dan Rp. 1,040,702 (Tabel 10). Terlihat adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara untuk 20% teratas, persentase pengeluaran tahun 2020 berada lebih besar dibandingkan tahun 2019 namun lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2018. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran teratas ini, rata-rata tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4,781,814, sementara pada tahun 2020 ada pada angka Rp. 4,695,163. Berdasarkan perbandingan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk selama tiga tahun terakhir lebih dari 17%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Indeks Gini Kota Depok Tahun 2020 sebesar 0.342 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% terendah di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 18.79%, sehingga tergolong pada ketimpangan rendah.
- c) Berdasarkan Indeks Gini di Kota Depok pada periode 2010-2020, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Khususnya dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan Indeks Gini di Kota Depok, artinya ada perbaikan pemerataan pendapatan di Kota Depok.
- d) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, selama periode 2018 sampai dengan 2020, di Kota Depok selalu berada pada tingkat ketimpangan rendah.

4.2. Saran

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama tahun 2010-2020 cukup tinggi, yang selalu di atas 6 persen, namun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, sehingga pembangunan Kota Depok harus lebih focus memperhatikan inclusive growth dari pada pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b) Pemerintah Kota Depok hendaknya mengembangkan berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh dari hasil-hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemendikparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." *Equality Trust Research Digest*; no.2: pp.1–8
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). *WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*.
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. *ADB Working Paper Series*.
- World Bank. 2016. *Indonesia's rising divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>



Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Depok

**Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota
Depok Lantai 7 Jl. Margonda Raya No. 54
Depok**

Telp. (021) 29402276 dan (021) 7764410

Email: diskominfo@depok.go.id